

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah di Indonesia resmi diterapkan dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan,

rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian (Mardiasmo, 2009:25).

Pemerintah daerah menyusun dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan otonomi daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pemerintah daerah juga tidak bisa hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya, maka pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan sebagai sumber pendanaan lain. Dana perimbangan tersebut terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa PAD adalah Pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu elemen utama yang menjadi sumber pemasukan suatu pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga mencerminkan kondisi yang

sesungguhnya dari daerah tersebut. Apabila pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah kuat maka boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat.

Tetapi pemerintah daerah seringkali mendapat permasalahan dalam menggali potensi daerahnya tersebut, seperti belum maksimalnya penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Begitu juga permasalahan lain seperti kesenjangan fiskal yang mengakibatkan PAD saja tidak cukup untuk mendanai pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan umum dan pembangunan daerah sehingga pemerintah pusat masih harus mentransfer dana perimbangan.

Selain pendapatan asli daerah, yang menjadi salah satu penerimaan pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam memenuhi dana kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka

pemerintah pusat melakukan transfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu dana alokasi umum.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan dana tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan public yang lebih baik. Dana alokasi umum daerah pemberiannya dihitung berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Pemberian DAU oleh pemerintah pusat masih sangat tinggi beberapa tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Negara yang menjalankan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan daerahnya masing-masing, salah satu kewenangannya adalah menentukan alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran dari anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu

periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian daerah (Sugiyanta, 2016:20).

Belanja daerah yang termasuk belanja modal patut diperhitungkan karena berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan fasilitas public. Belanja modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas agar menunjang kinerja pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Pada praktik di lapangan, pengalokasian sumber daya pemerintah bukan sesuatu yang mudah tetapi merupakan hal yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu dibutuhkan sumber pendanaan yang cukup baik dari pendapatan daerah sendiri salah satunya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) guna memaksimalkan belanja modal.

Uraian di atas menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Savirra Aidah Rachim, Ratna Wijayanti D.P, dan Noviansyah Rizal (2019) menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini merupakan subjek penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Beberapa informasi yang menjadikan provinsi ini sebagai subjek penelitian diantaranya adalah berdasarkan informasi yang dikutip dari laman detik.com pada tahun 2019 tentang artikel yang berjudul “Ironi Kabupaten Bogor: PAD Tertinggi di Jabar, Banyak Desa Tertinggal” menyatakan bahwa Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan bahwa masih ada desa tertinggal di kawasannya, padahal berdasarkan BPS Kabupaten Bogor PAD Kabupaten Bogor tahun 2018 mencapai Rp 2.794.660.740.152,00 yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Namun demikian, pada Agustus lalu menyatakan ada 45 desa di Kabupaten Bogor yang masih berstatus tertinggal. Berdasarkan informasi tersebut dapat dikatakan bahwasannya di Provinsi Jawa Barat meskipun memiliki PAD yang tinggi tetapi masih terdapat kendala dalam pengalokasian pendapatan yang diperolehnya terutama yang berkaitan dengan belanja modal.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dikutip dari laman tagar.id tahun 2019 tentang artikel yang berjudul “Pajak dan Retribusi BUMD Belum Dongkrak PAD Jabar” menyatakan bahwa Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memaksimalkan sektor yang sebenarnya sangat potensial untuk peningkatan PAD seperti pajak dan retribusi daerah serta BUMD, sudah saatnya ada upaya dari

Pemprov Jabar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut. Berdasarkan informasi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemprov Jabar penerimaan daerah dari PAD masih dapat ditingkatkan sehingga akan mampu membiayai dan mendanai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh daerah dengan maksimal sehingga kesejahteraan publik menjadi lebih baik.

Selain mengenai PAD, di Pemprov Jabar masih memiliki beberapa kendala di sumber daya lainnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana informasi yang dikutip dari laman okezone.com tahun 2019 tentang artikel yang berjudul “Soal DAU, Ridwan Kamil Ingin Adanya Keadilan Fiskal” menyatakan bahwa Gubernur Jabar mengungkapkan bahwa pemerintah pusat ini kasih uang berbanding lurus dengan jumlah daerah, kalau daerahnya dikit duitnya dikit, kalau daerahnya banyak, duitnya banyak. Padahal, jumlah penduduknya tidak imbang. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga ada yang dirasakan oleh masyarakat. Ini menjelaskan bahwa jika kapasitas fiskal (PAD dan DBH) suatu daerah besar dan kebutuhan fiskal (luas wilayah dan jumlah penduduk) juga besar, maka celah fiskal daerah tersebut tetap punya gap besar sehingga membutuhkan Dana Alokasi Umum yang besar pula. Sejalan dengan informasi yang dikutip dari cnnindonesia.com tahun 2019 tentang artikel yang berjudul “Periode II, Jokowi Diminta Tingkatkan Alokasi Dana ke Jabar” menyatakan bahwa Gubernur Jawa barat meminta agar pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua bisa memberikan keadilan fiskal bagi Provinsi Jawa Barat, Pasalnya ia merasa terjadi ketidakadilan dalam alokasi anggaran, khususnya Dana Alokasi Umum. Berdasarkan informasi-informasi di atas dapat dikatakan bahwa Pemprov Jabar masih belum mendapatkan DAU yang

adil sesuai dengan kebutuhannya, padahal jumlah penduduk Jabar merupakan salah satu penyumbang angka terbesar bagi jumlah penduduk Indonesia sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk menciptakan kesejahteraan penduduknya.

Pemprov Jawa Barat juga masih memiliki kendala di dalam penyerapan APBD terutama dalam penyerapan belanja modal. Sejalan dengan informasi yang dikutip dari laman okezone.com tahun 2019 tentang artikel “Selisih Anggaran Daerah Rp 20 Triliun, Pemda Diminta Genjot Penyerapan” menyatakan bahwa Mendagri mengungkapkan bahwa SiLPA Provinsi menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan, salah satunya adalah Pemprov Jabar dengan SiLPA sebesar Rp 2,25 Triliun. Salah satu penyebabnya adalah adanya realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggaran terutama belanja modal. Kemudian sejalan dengan informasi yang dikutip dari tribunjabar.id tahun 2018 tentang artikel yang berjudul ”Pemprov Jabar Kebut Serapan Anggaran Sampai Akhir Tahun” menyatakan bahwa Sekda Jabar, Iwa Karniwa mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar mempercepat proses belanja modal di sejumlah organisasi perangkat dinas (OPD). Dengan demikian, penyerapan APBD 2018 bisa maksimal sampai sisa waktu penyerapan APBD Jabar 2018. Berdasarkan informasi-informasi di atas dapat dikatakan bahwa Pemprov Jabar masih belum maksimal dalam penyerapan belanja modal meskipun memiliki pendapatan yang memadai.

Informasi-informasi di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber-sumber utama untuk

mendanai belanja Modal. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka kebutuhan akan dana Belanja Modal akan terpenuhi sehingga terjadi peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat yang akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. **Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018)**, Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. **Herman Yawa dan Treesje Runtu (2015)**. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Di Kota Manado. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. **Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018)**. E-Jurnal Manajemen UNUD, Bali. Dengan judul Pengaruh PAD, DAU, dan DAK

terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. (2) DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. (3) DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

4. **Suryana (2018).** Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Widyatama, Bandung. Dengan judul Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5. **Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, dan Parmadi (2019).** Jurnal Paradigma Ekonomika Universitas Jambi. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
6. **Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015).** Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Universitas Stikubank. Dengan judul

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. (3) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. (4) Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. (5) Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

7. **Fadrul dan Eka Pariani (2018).** Jurnal Bilancia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia. Dengan Judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
8. **Intan Savirra Aidah Rachim, Ratna Wijayanti D.P, dan Noviansyah Rizal (2019).** Jurnal *Progress Conference* STIE Widya Gama Lumajang. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015 – 2017. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. (3) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

9. **Nissa Anggit Pratiwi (2019).** Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) Universitas Padjadjaran, Bandung. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
10. **Yani Rizal dan Erpita (2019).** Jurnal Samudra Ekonomika Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
11. **Justonly Lengkong, David P.E Saerang, dan Stanly Alexander (2013).** Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Propinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
12. **Andreas Marzel Palealu (2013).** Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. Dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003 – 2012. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

13. **Jessy Christine Mangowal (2013).** Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
14. **Tria Saskia Dana, Paul David Elia Saerang dan Inggriani Elim (2016).** Jurnal Berkala Ilmiah Efisien Universitas Sam Ratulangi Manado. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Bitung 2003 – 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
15. **Wimpi Priambudi (2017).** Jurnal Nominal Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. (3) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018)	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol.6 No.1 Tahun 2018 P-ISSN. 2337-653x, E-ISSN. 2598-3253.
2	Herman Yawa dan Treesje Runtu (2015).	▪ Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 3. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi, Manado Vol.15 No.04 Tahun 2015.
3	Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus. ▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	E-Jurnal Manajemen UNUD Vol.7 No.3 Tahun 2018 ISSN. 2302-8912.
4	Suryana (2018).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus. ▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Widyatama, Bandung Vol.9 No.2 September 2018.

5	Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, dan Parmadi (2019).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus. ▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 3. Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Paradigma Ekonomika Universitas Jambi Vol.14 No.1 Januari – Juni 2019 ISSN. 2085-1960 (print).
6	Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. ▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 3. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 4. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. 5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.	Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Universitas Stikubank Vol.4 No.2 Nopember 2015 ISSN. 1979-4878.
7	Fadrul dan Eka Pariani (2018).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah,	▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh	Jurnal Bilancia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia

		Dana Alokasi Umum.	Regresi Linear Berganda.	signifikan terhadap Belanja Modal.	Vol.2 N0.2 Juni 2018 ISSN. 2549-5704.
		▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.		2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
8	Intan Savirra Aidah Rachim, Ratna Wijayanti D.P, dan Noviansyah Rizal (2019).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.	▪ Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus.	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal <i>Progress Conference</i> STIE Widya Gama Lumajang Vol.2 Juli 2019 E-ISSN. 2622-304X, P-ISSN. 2622-3031.
		▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Lokasi Penelitian.	2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
			▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda	3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
9	Nissa Anggit Pratiwi (2019).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.	▪ Lokasi Penelitian.	1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Universitas Padjadjaran, Bandung Vol.3 No.2 Mei – Agustus 2019 E-ISSN. 2621-5306 P-ISSN. 2541-5255 DOI. 10.31955/mea.v ol3.iss2.pp105-120.
		▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
				3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
10	Yani Rizal dan Erpita (2019)	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah.	▪ Lokasi Penelitian.	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Samudra Ekonomika Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Vol.3 No.1 April 2019.
		▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Teknik Analisis Regresi Linear Sederhana.		
11	Justonly Lengkong, David P.E Saerang, dan Stanly Alexander (2013).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah.	▪ Lokasi Penelitian.	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT Vol.3 No.3 September 2013 Hal. 69-76 ISSN. 1907-9737.
		▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Teknik Analisis Regresi Linear Sederhana.		

12	Andreas Marzel Palealu (2013).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus. ▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.1 No.4 Desember 2013 Hal. 1189-1197 ISSN.2303-1174.
13	Jessy Christine Mangowal (2013).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Sederhana.	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.1 No.4 Desember 2013 Hal. 1386-1396 ISSN. 2303-1174.
14	Tria Saskia Dana, Paul David Elia Saerang dan Inggriani Elim (2016).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisieni Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.16 No.3 Tahun 2016
15	Wimpi Priambudi (2017).	▪ Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum. ▪ Variabel Dependen: Belanja Modal.	▪ Lokasi Penelitian. ▪ Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan	Jurnal Nominal Universitas Negeri Yogyakarta Vol.VI No.1 Tahun 2017.

berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Belanja
Modal.

Angga Abdul Matin (2022) 153403052

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2012 – 2021).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan di atas, disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan adanya keterkaitan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh dalam pembiayaan Belanja Modal, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2012 – 2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pernyataan mengenai gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Pengaruh secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai konsep dan teori Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktik

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai topik yang diteliti serta pengalaman nyata atas teori dan ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam penyusunan anggaran serta realisasinya.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembanding serta petunjuk untuk keperluan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama atau sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang membutuhkannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data-data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu <https://jabar.bps.go.id> .

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2022 hingga bulan Maret 2022. Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan tabel waktu penelitian pada lampiran.